

Alat Kebijakan dalam Sistem Pendidikan Sebagai Pilar untuk Kemajuan Pendidikan Nasional

Lili Raflika¹, Salniati Nasution², Khalid Samahangga³, Abdul Fattah Nasution⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: liliraflika568@gmail.com¹, salninasion0220@gmail.com², khalidsamahangga15@gmail.com³, abdufatahnasution@uinsu.ac.id⁴

Abstract. Policy tools have an important role in shaping a quality, inclusive, and sustainable education system. This article aims to identify and analyze the various policy tools used in the education system, including regulations, economic instruments, and information instruments. Using an analytical-descriptive approach, this article explores how policy tools are applied to support the achievement of national education goals, such as improving access, quality, and equity in education. The findings show that the success of policy tools is greatly influenced by the effectiveness of implementation, the capacity of human resources, and synergies between various stakeholders. However, challenges such as access gaps in remote areas, technological limitations, and lack of transparency in policy management remain obstacles. To overcome these challenges, it is recommended that strategies in the form of strengthening human resource capacity, digitization of the education system, as well as increased collaboration between the government, the private sector, and the community. With the implementation of effective policy tools, the education system can become the main pillar in advancing the nation and creating a globally competitive generation.

Keywords: policy tools, education system, regulations, economic instruments, digitalization of education.

Abstrak. Alat kebijakan memiliki peran penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai alat kebijakan yang digunakan dalam sistem pendidikan, termasuk regulasi, instrumen ekonomi, dan instrumen informasi. Dengan menggunakan pendekatan analitis-deskriptif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana alat kebijakan diterapkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, seperti peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan alat kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi, kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses di daerah terpencil, keterbatasan teknologi, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebijakan masih menjadi hambatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan strategi berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pendidikan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan implementasi alat kebijakan yang efektif, sistem pendidikan dapat menjadi pilar utama dalam memajukan bangsa dan menciptakan generasi yang berdaya saing global.

Kata Kunci: alat kebijakan, sistem pendidikan, regulasi, instrumen ekonomi, digitalisasi pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin pesat, sistem pendidikan dituntut untuk adaptif dan inovatif dalam memberikan layanan pendidikan yang merata dan inklusif.

Alat kebijakan menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Berbagai alat kebijakan, seperti regulasi, pendanaan, dan teknologi informasi, dirancang untuk mendukung proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan

pendidikan. Namun, efektivitas alat kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diterapkan, dan dimonitor dalam berbagai konteks lokal, nasional, maupun global.

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif alat kebijakan yang digunakan dalam sistem pendidikan, termasuk jenis, fungsi, dan implementasinya. Selain itu, artikel ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan alat kebijakan serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan memahami peran dan pengelolaan alat kebijakan, diharapkan sistem pendidikan dapat menjadi motor penggerak bagi kemajuan bangsa dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Literature review adalah studi yang menganalisis seleksi literatur dari berbagai sumber untuk menghasilkan kesimpulan dan gagasan. Terdapat lima tahapan digunakan untuk melakukan peninjauan literatur. Tujuannya adalah sebagai berikut: mencari literatur yang relevan, menilai sumber ulasan literatur, menemukan tema dan perbedaan antara teori dengan situasi dilapangan, membuat struktur garis besar dan menyusun hasil ulasan dan menarik kesimpulan. Mengidentifikasi dua jurnal internasional lainnya untuk mendukung telaah dan hasil analisis (Cahyono, et al., 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literature review*) untuk menganalisis konsep, implementasi, dan efektivitas alat kebijakan dalam sistem pendidikan. Studi pustaka dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dan terpercaya, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Alat Kebijakan dalam Sistem Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari Bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Rozak, 2021).

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999).

Kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu konsep tata cara dalam menghasilkan informasi yang berbentuk sebuah kumpulan data-data dipendidikan sebagai suatu pengarah sebagai alat alternatif untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah (Wardani et al., 2022).

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri analisis kebijakan pendidikan (Sa'ud, 2002).

Alat kebijakan dalam sistem pendidikan adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi terkait untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Alat-alat ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu, seperti peningkatan kualitas, akses, pemerataan, dan efisiensi sistem pendidikan (Rusdiana, 2015).

Secara umum, alat kebijakan dalam sistem pendidikan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis:

a) Instrumen Regulasi

Instrumen regulasi adalah perangkat hukum dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur tata kelola, prosedur, dan standar pelaksanaan pendidikan. Instrumen ini bersifat mengikat dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Fungsi dari instrumen regulasi adalah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi semua pemangku kepentingan pendidikan dan menjamin standar mutu dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan (Rohani, 2020). Contoh penerapan dari instrumen regulasi adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Regulasi tentang Sertifikasi Guru.

b) Instrumen Ekonomi

Instrumen ekonomi adalah kebijakan yang menggunakan insentif atau alokasi sumber daya finansial untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan.

Fungsi dari instrumen ekonomi adalah memastikan pembiayaan yang memadai untuk pendidikan dan mengurangi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan. Contoh penerapan instrumen ekonomi yaitu Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Program Beasiswa, Subsidi Pendidikan, dan Insentif Guru di Daerah Khusus.

c) Instrumen Informasi

Instrumen informasi adalah kebijakan yang menggunakan data, panduan, atau laporan sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Fungsi dari instrumen informasi adalah Menyediakan informasi yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan dan Memberikan panduan teknis kepada pemangku kepentingan. Penerapan dari instrumen informasi yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Asesmen Nasional (AN), Publikasi Hasil Penelitian Pendidikan, dan Panduan Kurikulum.

d) Instrumen Teknologi

Instrumen teknologi adalah pemanfaatan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan. Fungsi instrumen teknologi adalah Memperluas jangkauan pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau dan Meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pada penerapannya, instrumen teknologi mengadakan Platform Pembelajaran Daring, Digitalisasi Administrasi Pendidikan, Aplikasi Evaluasi Daring, dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*).

2. Implementasi Alat Kebijakan dalam Sistem Pendidikan

Implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah, bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan. Dimana keseluruhan tindakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan. Hal senada dijelaskan implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara langsung menerapkannya dalam bentuk program kegiatan atau melalui (turunan) dari kebijakan formulasi kebijakan *derivate* itu sendiri sebagai kebijakan penjelas atau sering disebut dengan peraturan pelaksanaan (Zuanda et al., 2024).

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik, sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak di implementasikan, tidak akan dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan pendidikan itu, jika sudah diimplementasikan, akan lebih berguna apapun dan seberapa pun hasilnya.

Proses implementasi kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang penting (*urgen*), bahkan dipandang jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan pendidikan, karena implementasi menjadi jembatan penghubung perumusan kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Anderson menjelaskan ada 4 komponen dalam implementasi kebijakan pendidikan, 1) siapa yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan itu, 2) proses administrasi, 3) kepatuhan yang diharapkan, 4) dampak pelaksanaan kebijakan pendidikan itu (Abdul Wahab, Solichin, 2004).

Implementasi kebijakan pendidikan suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan *policy goal* dengan melewati suatu proses (*delivery mechanism*) yang sesuai dengan prosedur dan *policy outcomes* (menikmati hasil kebijakan) yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan, untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi.

Implementasi kebijakan pendidikan mengadaptasi pemikiran Charles O Jones dalam Gaffar memiliki tiga tahapan utama, yakni *organization, interpretation, and application*, sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Dalam konteks interpretasi, bisa dimaknai dari konsepsi “*interpretation is the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*”. Tahapan interpretasi (*interpretation*) disini merupakan penjelasan substansi dari kebijakan pendidikan dalam bahasa lebih operasional, mudah dipahami,

dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan itu sendiri. Tahap Interpretasi disini menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang masih berbentuk abstrak menjadi rumusan, sifatnya teknis dan operasional.

Konteks pengorganisasian implementasi kebijakan pendidikan, bisa dilihat dari makna “*organization is the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect*”. Maksudnya, aktivitas implementasi kebijakan pendidikan diawali dengan pengorganisasian (*organization*) sebagai upaya menetapkan dan menata sumber daya (*resources*), unit (*units*), dan metode (*methods*) mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan.

Terkait dengan penerapan, dimaknai bahwa “*application is the routine of service, payments, or other agree upon objectives or instrument*”. Tahapan application ini merupakan tahapan aktivitas pelaksanaan atau penyediaan layanan secara rutin sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang ada Tahapan aplikasi ini sering juga disebut sebagai tahapan penerapan rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompok target atau sasaran kebijakan Pendidikan (Charles O Jones dalam Gaffar, 1997).

3. Strategi Peningkatan Efektivitas Alat Kebijakan

Untuk memastikan alat kebijakan dalam sistem pendidikan berjalan secara optimal, diperlukan strategi yang tepat guna mengatasi tantangan implementasi dan meningkatkan efektivitasnya. Strategi ini melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan (Hendrawati et al., 2024). Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

a. Penguatan Desain Kebijakan

Penguatan desain kebijakan merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dirancang secara tepat, relevan, dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Desain kebijakan yang kuat akan memberikan landasan kokoh bagi implementasi dan evaluasi kebijakan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih efektif.

b. Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kebijakan

Peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan merupakan aspek krusial dalam memastikan kebijakan pendidikan yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Pelaksana kebijakan, seperti guru, kepala sekolah, aparat

pemerintah, dan pengelola pendidikan lainnya, memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mereka baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sumber daya menjadi hal yang sangat penting. Berikut adalah beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pelaksana kebijakan dalam sistem pendidikan.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi (M&E) dalam kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sistem M&E yang efektif dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal, memberikan umpan balik untuk perbaikan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dalam pendidikan (Mayasari et al, 2022).

d. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan faktor penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi digital yang mengubah cara pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pendidikan, serta mendukung pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, teknologi harus diintegrasikan dalam setiap aspek pelaksanaan kebijakan pendidikan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi (Tsuraya et al., 2024).

e. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan dana pendidikan yang efisien sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dana pendidikan yang terbatas harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan pendidik. Untuk itu, peningkatan efisiensi pengelolaan dana pendidikan memerlukan langkah-langkah strategis yang dapat memaksimalkan penggunaan anggaran, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian tujuan Pendidikan (Fadhila et al, 2024).

f. Meningkatkan Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan

Kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Pemangku kepentingan dalam pendidikan mencakup berbagai pihak, antara lain pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), masyarakat, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah (LSM). Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun jika dapat bekerja sama secara harmonis, maka tujuan pendidikan yang lebih baik dapat tercapai (Sholeh, 2023).

5. KESIMPULAN

Alat kebijakan dalam sistem pendidikan, seperti peraturan, kurikulum, anggaran, dan sistem evaluasi, memiliki peran krusial dalam memajukan pendidikan nasional. Untuk mencapai efektivitasnya, kebijakan pendidikan perlu didukung oleh strategi yang tepat, seperti penguatan desain kebijakan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pemanfaatan teknologi dan efisiensi pengelolaan dana. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, alat kebijakan yang efektif akan menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tantangan zaman, serta mampu menghasilkan generasi yang kompeten dan berkarakter.

DAFTAR REFERENSI

- ahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur review: Panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Fadhila, N., & Riani, L. P. (2024). Menelisik problematika pembiayaan pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur.
- Gaffar, A. (1997). *Publik policy: State of the discipline, model and proses*. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Hendrawati, T., Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Yustiva, F., & Masqurah, H. (2024). Kebijakan dan strategi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Technical and Vocational Education International Journal*, 4(1), 1439–1448.

- Mayasari, I., Rahmania, T., Cempaka, G., Subagjo, A., & Driarkoro, R. (2022). Monitoring dan evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai peningkatan kualitas pendidikan di tingkat fakultas: Studi pada Universitas Paramadina. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 4(1).
- Rohani, I. (2020). Kajian kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(1), 80–99. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33>
- Rozak, A. (2021). Kebijakan pendidikan Indonesia. *Alim-Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Rusdiana. (2015). Kebijakan pendidikan (dari filosofi ke implementasi) (Cetakan 1). Pustaka Setia. [http://digilib.uinsgd.ac.id/11509/1/Kebijakan Pendidikan.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/11509/1/Kebijakan_Pendidikan.pdf)
- Sa'ud, U. (2002). Pengembangan kebijakan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195306121981031-UDIN_SYAEFUDIN_SA%27UD/Kebijakan_Pend.-Bapenas_2002.pdf
- Sholeh, M. I. (2023). Strategi efektif dalam manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 4(2), 139–164. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.462>
- Tsuraya, F. G., Rizkiani, S. T., & Kusumaningrum, H. (2024). Manajemen strategi dalam meningkatkan pendidikan yang kuat. *Education Management*, 2(1), 39–46.
- Wahab, S. A. (2004). Pengantar studi analisis kebijakan negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wardani, A. W., Setiawan, F., Rifki, M., & Dinillah, N. N. (2022). Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. *Universitas Ahmad Dahlan*, 1(3), 91–93. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3833/2556> <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3833>
- Zuanda, S., Fahrezi, D. W., Rised, G. F., & Syaifuddin, M. (2024). Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27207–27218.